

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN MAROKO DENGAN ISRAEL

Di bab ini, penulis akan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana dinamika hubungan antara Maroko dengan Israel, bagaimana awal mula Maroko dan Israel mulai melakukan kerja sama dan hingga berakhir melakukan normalisasi hubungan. Dimana sebelumnya, Maroko sempat membangun hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1994, namun hubungan tersebut dibekukan oleh Maroko sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina saat terjadi Intifada Kedua di Palestina. Selanjutnya, akan dibahas juga bagaimana normalisasi tersebut berdampak pada konflik yang sedang dihadapi Maroko, yaitu perebutan wilayah Sahara Barat dengan Front Polisario.

2.1 Sejarah Hubungan Maroko-Israel

2.1.1 Hubungan Historis Maroko-Israel

Maroko dan Israel memiliki sejarah hubungan yang panjang, terutama mengenai Yahudi. Maroko sudah menganggap Yahudi sebagai bagian dari warisan sejarah mereka sejak dua ribu tahun yang lalu. Maroko selalu menjadi tanah air bagi orang-orang Yahudi dan menjadi tempat suci bagi Yahudi karena banyak orang suci mereka dimakamkan di Maroko. Muslim dan Yahudi telah hidup berdampingan secara damai di Maroko selama berabad-abad (Chtatou, 2023). Pada akhir 1940-an, komunitas Yahudi di Maroko adalah yang terbesar di antara negara-negara Arab lainnya, mencakup sekitar 270 ribu orang Yahudi. Namun pada 1950-an, sebagian besar komunitas tersebut melakukan emigrasi ke Israel, peristiwa ini menjadi awal interaksi

antara Maroko dengan Israel karena kedua pihak harus mengatur gelombang emigrasi yang terjadi (Levi, 2018). Emigrasi besar-besaran komunitas Yahudi Maroko tersebut membuat sekitar satu juta penduduk Israel saat ini berasal dari Maroko atau keturunan dari mereka yang berasal dari Maroko, menyebabkan kedua negara selalu memiliki minat yang mendalam satu sama lain (Bergman, 2020).

Meskipun mayoritas dari komunitas Yahudi yang ada Maroko sudah melakukan emigrasi ke Israel, masih terdapat sebagian kecil yang bertahan di Maroko. Terdapat sekitar 2.500 orang yang bertempat tinggal di Maroko. Meskipun menjadi minoritas, perwakilan dari komunitas ini terus memiliki peran yang penting, contohnya Andre Azoulay yang bertugas sebagai penasehat untuk Raja Maroko. Lalu ada Serge Berdugo, presiden komunitas Yahudi dan mantan Menteri Pariwisata, yang dianugerahi gelar "*Ambassador Itinerant of His Majesty King Mohammed VI*" karena telah berperan untuk mendapatkan dukungan dari lobi Yahudi di AS untuk mendukung Maroko. Selain itu, komunitas Yahudi Maroko juga berperan dalam menjadi penghubung antara Maroko dan Yahudi Maroko di Diaspora, termasuk mereka yang sekarang tinggal di Israel (Levi, 2018).

2.1.2 Dinamika Hubungan Maroko-Israel sebelum Normalisasi

Pada 1963, Maroko dan Israel menandatangani kesepakatan jual beli senjata secara berkala. Israel, yang dibantu oleh Mesir, juga pernah mengirimkan pesawat *Mystère* dan tank buatan Perancis ke Maroko untuk membantu Maroko yang sedang berperang dengan Aljazair. Pada 1976, kedekatan antara Maroko dengan Israel semakin

meningkat saat Raja Hassan II dari Maroko melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, mengenai adanya kemungkinan bagi Maroko untuk membantu mendorong pelaksanaan dialog antara Israel dengan Mesir. Satu tahun setelahnya, Maroko menjadi tuan rumah pertemuan rahasia antara Menteri Luar Negeri Israel dan Mesir. Pertemuan tersebut kemudian membuka jalan untuk kunjungan Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat, ke Israel pada November 1977 (Levi, 2018).

Adanya Perjanjian Oslo membuat hubungan kedua negara semakin meluas dan berkembang, hal ini terlihat pada September 1993 saat Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin dan Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Peres mengunjungi Maroko dalam perjalanan kembali dari Washington setelah penandatanganan Perjanjian Oslo. Kedatangan dua tokoh politik tersebut ke Maroko bertujuan untuk mempromosikan hubungan formal antara Israel dan Maroko. Setelah kedatangan tersebut, hubungan kedua negara semakin dekat, yang ditunjukkan dengan periode perdamaian ekonomi. Pada tahun 1994 hingga beberapa tahun ke depan, Maroko dan Israel menikmati puncak kedekatan hubungan mereka. Raja Hassan II menjadi tuan rumah Konferensi Casablanca yang dilaksanakan pada Oktober 1994. Konferensi ini merupakan bagian dari serangkaian konferensi ekonomi regional yang dihadiri oleh para pemimpin dan pengusaha dari negara-negara Arab dan Israel. Konferensi ini dilaksanakan untuk mempromosikan kemitraan ekonomi antara Timur Tengah dan Afrika Utara. Di akhir konferensi, Deklarasi Konferensi Casablanca dikeluarkan, yang sekaligus menandakan berakhirnya boikot negara-negara Arab terhadap Israel (Levi, 2018). Pada 1 September 1994, terjadi perkembangan besar di hubungan Maroko-Israel, dimana kantor

penghubung Israel dibuka di Rabat, yang dapat diartikan bahwa ini adalah bentuk pengakuan Maroko atas Israel. Dua tahun setelahnya, Maroko juga membuka kantor penghubung di Israel (Taher, 2020).

Selain melakukan kerja sama secara publik, Maroko dan Israel juga kerap melakukan kerja sama rahasia yang erat hubungannya dengan masalah intelijen dan militer. Israel telah membantu menyediakan senjata untuk Maroko dan melatih orang-orang Maroko bagaimana menggunakannya. Israel juga memasok teknologi intelijen dan membantu mengatur dinas intelijen Maroko. Selanjutnya, kedua pihak saling berbagi informasi yang dikumpulkan oleh mata-mata mereka. Pada 1965, ketika pemimpin dan komandan militer negara-negara Arab bertemu di Casablanca, Maroko mengizinkan Mossad, agen mata-mata Israel, untuk menyadap pertemuan tersebut. Tak lama setelahnya, atas permintaan intelijen Maroko, Mossad memancing Ben Barka, pemimpin kelompok oposisi Maroko, untuk datang ke Paris. Disana, Maroko yang dibantu oleh Perancis menculik dan menyiksa Ben hingga mati, yang hingga saat ini mayatnya tidak pernah ditemukan keberadaannya. Intelijen Maroko juga pernah bergabung dalam rencana gagal Israel untuk merekrut sekretaris Osama bin Laden dengan tujuan untuk menemukan dan membunuh pemimpin Al-Qaeda tersebut (Bergman, 2020).

2.1.3 Pembekuan Hubungan Maroko-Israel

Kedekatan antara Maroko dan Israel hanya bertahan selama sekitar enam tahun dikarenakan Maroko yang secara resmi membekukan hubungan dengan Israel pada 23

Oktober 2000 (Taher, 2020). Terdapat tiga alasan utama mengapa pembekuan hubungan tersebut dapat terjadi, pertama, kematian Raja Hassan II pada 1999. Setelah kepemimpinan Maroko digantikan oleh Raja Mohammed VI, arah politik Maroko berubah menjadi lebih berfokus dengan urusan domestik. Raja Mohammed VI memilih untuk berfokus pada pembentukan pemerintahannya dan berusaha mengatasi tiga tantangan utama Maroko, yaitu masalah pembangunan, penguatan Islamisme, dan konflik dengan Sahara Barat. Sejak dipimpin oleh Raja Mohammed VI, Maroko belum memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan negara-negara tetangganya. Maroko hanya berpartisipasi dan mendukung inisiatif dan konvensi yang mempromosikan solusi politik terkait konflik Israel-Palestina (Levi, 2018).

Sejak menjadi Raja Maroko pada 1999, Raja Mohammed VI telah berhasil membuat perubahan domestik yang signifikan, contohnya seperti pembangunan infrastruktur di pedesaan, liberalisasi sektor swasta, pengembangan masyarakat sipil, pengembangan sektor keuangan, dan pengurangan biaya hidup. Dampak dari perubahan-perubahan tersebut adalah perekonomian Maroko semakin meningkat. Selain itu, Maroko juga berhasil menahan protes *Arab Spring*, tindakan yang Maroko lakukan adalah dengan melakukan reformasi konstitusi. Isi reformasi tersebut salah satunya adalah Raja akan melepaskan sebagian kekuatan administratifnya dan selanjutnya akan diurus oleh Perdana Menteri. Isi lainnya adalah Perdana Menteri merupakan pemimpin dari partai yang memenangkan pemilihan umum, bukan seseorang yang ditunjuk oleh Raja. Beberapa perubahan lainnya adalah pemberian hak-

hak sipil baru dan mendorong perundang-undangan yang berkaitan dengan status perempuan. Bersamaan dengan reformasi ekonomi dan sosial, Raja Mohammed VI terus memperkuat tentara dan menunjuk orang-orang kepercayaannya untuk menduduki posisi-posisi penting (Levi, 2018).

Alasan kedua merenggangnya hubungan Maroko dan Israel adalah kegagalan konferensi perdamaian Camp David yang terjadi pada Juli 2000 (Levi, 2018). Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, mengundang pihak Israel dan Palestina ke Camp David untuk menegosiasikan status akhir untuk perjanjian perdamaian akhir yang diharapkan pihak-pihak terkait. Ketua PLO (*Palestinian Liberation Organization*), Yasser Arafat, mendatangi konferensi tersebut meskipun merasa enggan. Arafat menganggap bahwa Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, tidak dapat dipercaya karena gagal dalam menerapkan perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya. Dalam pertemuan rahasia sebelum Camp David, negosiator Palestina memberikan tawaran yang “murah hati” kepada Israel, salah satunya menerima aneksasi Israel atas pemukiman besar Yahudi di West Bank dengan imbalan tanah Israel dengan nilai yang sama. Namun tawaran ini dibalas dengan proposal yang tidak memiliki rincian yang hanya diucapkan melalui lisan oleh pihak Israel melalui pejabat Amerika Serikat. Proposal milik Israel dianggap hanya akan merugikan pihak Palestina karena wilayah Palestina di West Bank akan terfragmentasi menjadi empat unit, yang tiap unitnya dipisahkan satu sama lain dengan pemukiman dan jalan penghubung milik Israel. Negosiator Palestina melihat bahwa pihak Amerika Serikat menunjukkan bias dan

sangat jelas mendukung Israel. Selanjutnya Camp David berakhir tanpa terbentuk kesepakatan (Institute for Middle East Understanding, 2005).

Rakyat Palestina merasa frustrasi karena negosiasi bertahun-tahun tidak juga membuahkan hasil sementara pemukiman Yahudi terus berkembang pesat di wilayah mereka. Hal ini lalu membuat Intifada Kedua meletus pada Oktober 2000. Pemicu peristiwa tersebut adalah kunjungan provokatif pemimpin oposisi Israel, Ariel Sharon, ke kompleks masjid Noble Sanctuary di Yerusalem (Institute for Middle East Understanding, 2005). Ariel datang bersama dengan sekitar seribu polisi dan tentara Israel. Saat kunjungan tersebut, ia juga terlihat beberapa kali membuat beberapa isyarat simbolis. Tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah perlawanan terang-terangan terhadap Palestina dan secara langsung membangkitkan kemarahan warga Palestina. Selanjutnya terjadi perkelahian antara Palestina dan Israel yang berlangsung hingga 2005 (Wang, 2020). Terjadinya Intifada Kedua ini menjadi alasan ketiga berhentinya hubungan baik antara Maroko dan Israel.

Meskipun Maroko dan Israel sudah resmi memutuskan hubungan diplomatik, kedua negara kerap kali terlihat masih berinteraksi. Kerja sama bilateral biasanya dilakukan secara langsung, sedangkan kerja sama multilateral dilakukan melalui negara ketiga atau forum internasional (Levi, 2018). Beberapa interaksi yang terjadi antara Maroko dan Israel diantaranya adalah pada September 2003, Menteri Luar Negeri Israel, Silvan Shalom, mengunjungi Maroko untuk bertemu dengan Raja Mohammed VI (Taher, 2020). Lalu pada Desember 2008, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Aaron Abramovich, sempat mengunjungi Rabat dalam

rangka membahas adanya kemungkinan kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni, ke Maroko. Satu tahun setelahnya, pada November 2009, Livni akhirnya mengunjungi Maroko meskipun kunjungan tersebut memicu protes dan pemberitaan negatif oleh media lokal dan regional (Levi, 2018). Selanjutnya pada September 2009, Raja Mohammed VI diketahui melakukan diskusi melalui telepon mengenai peta jalan perdamaian Timur Tengah dengan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, ini merupakan bentuk upaya Maroko untuk mencapai perdamaian yang adil dan permanen. Lalu pada Februari 2019, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dikabarkan diam-diam bertemu dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di New York saat pelaksanaan Sidang Umum PBB (Taher, 2020). Pada Maret 2013, Angkatan Udara Maroko mendapat tiga drone Heron yang dipindahkan dari Israel ke Perancis, baru dikirimkan ke Maroko. Lalu pada 2014, Israel diketahui menjual sistem peperangan elektronik, komunikasi, dan kontrol ke Maroko (Levi, 2018).

Maroko dan Israel yang terlihat masih berhubungan setelah pembekuan hubungan diplomatik ternyata sempat mengalami bentrokan diplomatik, terutama di forum-forum internasional. Contohnya pada Juni 2017 saat pelaksanaan ECOWAS (*Economic Community of West African States*) di Liberia berlangsung, Maroko yang seharusnya mendatangi konferensi tersebut untuk pertama kalinya, memutuskan untuk membatalkan kedatangannya karena partisipasi Israel di konferensi (Levi, 2018). Lalu pada Agustus 2020, Perdana Menteri Maroko, Saad-Eddine El-Othmani, menyatakan bahwa Maroko menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan entitas Zionis

karena tindakan tersebut hanya akan memperkuat posisi mereka untuk terus melanggar hak-hak rakyat Palestina (Bandaris, 2020).

2.1.4 Maroko dalam Konflik Israel-Palestina

Maroko kerap kali menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat solidaritas yang tinggi terhadap Palestina di dalam konflik Israel-Palestina. Beberapa sikap yang menggambarkan hal tersebut adalah pertama, pada tahun 2000 Maroko membekukan hubungan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina saat Intifada Kedua terjadi (Taher, 2020). Kedua, Perdana Menteri Israel pada bulan Agustus 2020 menyatakan bahwa Maroko menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel karena hal tersebut hanya akan memperkuat posisi Israel untuk terus menyerang Palestina (Bandaris, 2020).

Maroko juga berperan aktif dengan menjadi Ketua *Yerusalem Committee and its Islamic Holy Sites* atas nama Organization of the Islamic Conference. Posisi ini menunjukkan kewibawaan agama Raja Maroko sebagai keturunan keluarga Nabi. Selama menjabat, pentingnya peran Maroko hanya bersifat simbolis, dan Maroko hanya mengadakan komite tersebut beberapa kali. Namun, peran ini dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan, terutama apabila hubungan antara Israel dan Palestina memburuk, dan Maroko sebagai Ketua Komite harus mengambil tindakan terkait masalah tempat suci di Yerusalem. Contohnya, pada Desember 2017 saat Amerika Serikat memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, Raja Mohammed VI mengirimkan pesan khusus kepada Donald Trump. Ia mengungkapkan

keprihatinan pribadinya atas tindakan yang dilakukan Amerika Serikat, dimana hal tersebut dapat melemahkan peluang mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk konflik Israel-Palestina. Raja Mohammed VI mendesak Trump untuk menahan diri dari segala tindakan yang dapat memicu sentimen frustrasi atau kekecewaan, yang menurutnya adalah akar penyebab ekstremisme dan terorisme (Levi, 2018).

Di dalam pemerintahan Maroko, *Justice and Development Party* (JDP) telah menjadi partai yang mendominasi Maroko sejak tahun 2011. Partai ini merupakan partai Islam yang sangat menentang normalisasi dengan Israel. Penentangan tersebut terlihat pada Agustus 2013, saat JDP bersama dengan partai-partai lainnya mengajukan rancangan undang-undang yang melarang hubungan apapun antara Maroko dan Israel. Meskipun pada akhirnya RUU tersebut tidak disahkan, namun sudah menggambarkan bagaimana sikap partai-partai yang ada di Maroko terhadap Israel (Levi, 2018).

Di Maroko, terdapat organisasi bernama *The Moroccan Observer against Normalization* yang memiliki peran penting dalam memimpin oposisi terhadap normalisasi antara Maroko dan Israel. Organisasi tersebut melakukan berbagai kegiatan seperti penggalangan dana, menyelenggarakan konferensi dan seminar untuk meningkatkan kesadaran akan perjuangan rakyat Palestina, *me-lobby* Parlemen Maroko, mengorganisir demonstrasi besar-besaran untuk mendukung perjuangan Palestina, dan memboikot segala bentuk kerja sama yang berhubungan dengan Israel. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi ruang lingkup kerja sama antara Israel dan Maroko. Meskipun gerakan-gerakan boikot yang dilakukan organisasi tersebut tidak menghalangi terwujudnya kerja sama antara Maroko dan Israel, namun

gerakan tersebut berhasil membatasi Maroko dan Israel untuk mewujudkan potensi penuh dari hubungan mereka. Contoh keberhasilan boikot oleh *The Moroccan Observer against Normalization* adalah berhasil membatalkan rencana kunjungan Shimon Peres, mantan perdana menteri dan presiden Israel, pada tahun 2010 dan 2015 (Levi, 2018).

2.1.5 Normalisasi Hubungan Diplomatik Maroko-Israel pada Tahun 2020

Setelah Maroko dan Israel mengalami banyak pasang surut dalam hubungan mereka. Akhirnya pada hari Kamis, 10 Desember 2020, berdasarkan pernyataan resmi dari istana kerajaan Maroko, Raja Mohammed VI, mengumumkan keinginannya untuk melanjutkan kontak resmi dan hubungan diplomatik dengan Israel sesegera mungkin. Mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan, yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel terlebih dahulu di tahun yang sama, keputusan Maroko ini menjadikannya negara Arab keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel (DW, 2020a).

Normalisasi antara Maroko dan Israel ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, dimana ia sudah mengusahakannya sejak empat bulan yang lalu (The White House, 2020a). Keberhasilan ini terjadi salah satu alasannya karena pihak Amerika yang menjanjikan pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Pada hari yang sama dengan terjadinya normalisasi Maroko-Israel, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat dan menegaskan kembali dukungannya untuk proposal otonomi

Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan abadi untuk sengketa atas wilayah Sahara Barat (The White House, 2020b).

Pernyataan pihak Amerika merupakan kabar yang sangat baik bagi Maroko dikarenakan sudah sejak lama pihak Maroko menginginkan dukungan Amerika Serikat atas kepentingan mereka terkait dengan konflik mereka di wilayah Sahara Barat (Levi, 2018). Tepatnya sejak 2006, pemimpin dari komunitas Yahudi Maroko, Serge Bardugo, telah menjadi duta besar Raja Muhammad VI dalam mengupayakan dukungan Amerika terhadap Maroko. Yang dilakukan oleh Bardugo adalah dengan melakukan pertemuan dengan pejabat Israel dan para pemimpin Yahudi Amerika. Terkadang pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri oleh Yassin Mansuri, teman lama raja yang mengepalai badan intelijen eksternal Maroko. Mansuri, pada gilirannya, bertemu dengan mitranya yang berasal dari Israel, Yossi Cohen, ketua Mossad, yang selanjutnya pihak-pihak tersebut melakukan beberapa negosiasi yang mengarah pada kesepakatan untuk menormalkan hubungan (Bergman, 2020).

Sebelumnya, hubungan antara Maroko-Amerika Serikat sempat masuk ke fase tidak jelas, dimana penunjukan duta besar Amerika Serikat untuk Maroko sempat tertunda hingga satu tahun, tepatnya hingga David Fischer ditunjuk pada November 2017. Namun, sebenarnya hubungan antara Maroko dan Amerika sangat kuat, didasari oleh sejarah panjang hubungan hangat dan simpatik. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam hal menjaga stabilitas di Afrika Utara dan wilayah Sahl serta upaya bersama untuk mencegah terorisme (Levi, 2018).

Berikut ini adalah tabel 2.1 yang meringkas bagaimana hubungan antara Maroko-Israel sejak awal melakukan kerja sama hingga sebelum terwujudnya normalisasi hubungan pada akhir tahun 2020:

Tabel 2. 1 Dinamika Hubungan Maroko-Israel sebelum Normalisasi

No	Tahun	Peristiwa
1.	1950-an	Interaksi Maroko dan Israel pertama kali saat orang-orang Yahudi di Maroko melakukan emigrasi ke Israel.
2.	1963	Maroko dan Israel menandatangani kesepakatan jual beli senjata.
3.	1976	Maroko membantu Israel mewujudkan pelaksanaan dialog antara Israel dengan Mesir.
4.	1994-2000	Hubungan Maroko-Israel semakin dekat, dibuktikan dengan dibukanya kantor penghubung di masing-masing ibu kota kedua negara.
5.	2000	Maroko resmi membekukan hubungan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

6.	2003-2020	Maroko dan Israel masih melakukan kerja sama di berbagai bidang secara informal setelah pembekuan hubungan.
----	-----------	---

Sumber: (Levi, 2018)

2.2 Dinamika Hubungan Maroko-Sahara Barat

Dalam normalisasi hubungan antara Maroko dengan Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat, terdapat imbalan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Maroko. Imbalan yang diberikan adalah pengakuan Amerika Serikat atas Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah Maroko (Singer, 2021). Tindakan tersebut menimbulkan berbagai respon, hal ini dikarenakan Sahara Barat merupakan wilayah yang sedang diperebutkan oleh pihak Maroko dan pihak etnis Sahrawi yang tinggal di Sahara Barat. Konflik timbul di wilayah tersebut karena perbedaan keinginan dari kedua pihak. Maroko ingin Sahara Barat menjadi bagian wilayahnya, sedangkan etnis Sahrawi ingin kemerdekaan atas Sahara Barat (Gila et al., 2009).

Dinamika hubungan antara Maroko dengan Sahara Barat selanjutnya perlu dipaparkan lebih lanjut karena berhubungan dengan normalisasi hubungan yang terjadi antara Maroko dengan Israel. Dimana Amerika Serikat yang membantu terwujudnya normalisasi tersebut memberikan imbalan kepada Maroko yang berkaitan dengan nasib Sahara Barat. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan lebih rinci bagaimana awal mula konflik dan hubungan antara Maroko-Sahara Barat hingga bagaimana kelanjutan dari konflik tersebut saat ini. Selain itu, akan dijelaskan mengenai Front Polisario yang

berperan sebagai kelompok mewakili etnis Sahrawi di Sahara Barat dalam konflik antara Maroko. Akan dijelaskan juga bagaimana peran PBB dalam konflik Maroko-Sahara Barat.

2.2.1 Awal Mula Hubungan Maroko-Sahara Barat

Sahara Barat merupakan wilayah yang didominasi oleh gurun, ditandai dari hamparan bukit pasir yang luas dan dataran yang jarang bervegetasi. PBB mengategorikan Sahara Barat sebagai wilayah bekas koloni (Ghaedi, 2023). Hingga saat ini, nasib Sahara Barat masih dipertanyakan. Spanyol mulai melakukan dekolonisasi terhadap Sahara Barat sejak awal 1970-an dengan tujuan mengubah Sahara Barat menjadi negara merdeka setelah referendum mengenai penentuan nasib sendiri. Namun sejak 1956, Maroko telah mengklaim Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Tindakan Maroko ini didasarkan pada keinginan mereka untuk mengembalikan batas-batas Kekaisaran Almoravid kuno pada abad ke-11 dan ke-12. Maroko juga beranggapan bahwa beberapa suku Sahrawi (suku yang bertempat tinggal di Sahara Barat) pernah memberikan wilayahnya kepada Sultan Maroko (Gila et al., 2009).

Pada 1974, Maroko bersama dengan Mauritania memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang sedang terjadi di Spanyol untuk meminta pembagian wilayah Sahara Barat dan menginisiasikan demonstrasi besar-besaran di perbatasan Maroko-Sahara Barat. Selanjutnya pada 1975, tindakan tersebut berhasil memaksa Spanyol untuk menyetujui Perjanjian Madrid dan mengalihkan administrasi wilayah Sahara Barat

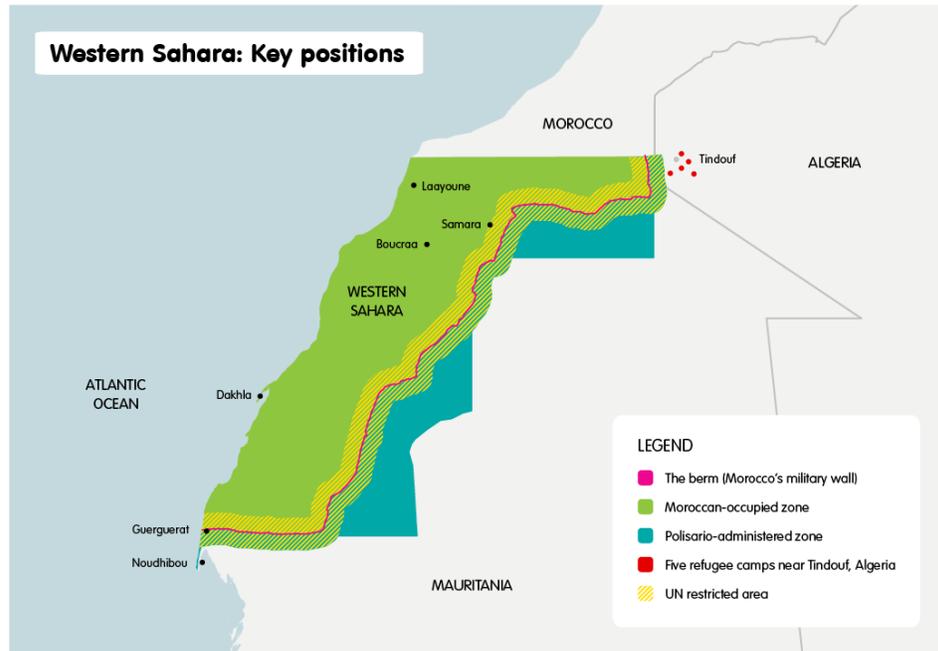
kepada Maroko dan Mauritania. Namun, perjanjian tersebut dikecam oleh Front Polisario dan mereka memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Sahara Barat yang diproklamasikan pada 1976 di Aljazair dengan nama SADR (*Sahrawi Arab Democratic Republic*). Hal ini selanjutnya juga menjadikan Aljazair sebagai negara pertama yang mengakui SADR (Gila et al., 2009).

2.2.2 Front Polisario dan Konflik Berkepanjangan dengan Maroko

Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro, yang disingkat Frente POLISARIO atau Front Polisario adalah sebuah organisasi politik-militer yang ada di Sahara Barat. Tujuan dari organisasi ini adalah mengklaim kemerdekaan atas Sahara Barat dan mengakhiri kendali atas Spanyol. Kemudian setelah Spanyol melepaskan Sahara Barat pada 1975, berubah menjadi mengakhiri kendali Maroko dan Mauritania atas Sahara Barat. Pemimpin pertamanya adalah El-Ouali Mustapha Sayed, ia membentuk Front Polisario pada Mei 1973. Awalnya, organisasi ini adalah kelompok pemberontakan, namun secara bertahap berkembang menjadi organisasi politik-militer. Di awal pembentukannya, Front Polisario adalah sebuah pasukan gerilya yang beranggotakan 1000-5000 orang, anggotanya sebagian besar adalah penduduk asli Sahara Barat, yaitu etnis Sahrawi. Front Polisario melaksanakan serangan pertamanya pada 20 Mei 1973, saat Sahara Barat masih dikuasai oleh pihak Spanyol. Target serangannya adalah pos militer Spanyol yang berada di El-Khanga (Besenyo, 2018).

Front Polisario memutuskan pindah ke Aljazair pada 1976 untuk mendapat dampak politik yang lebih besar dan agar memiliki sumber logistik yang aman. Perpindahan tersebut juga membuat Front Polisario dapat mengelola pasokan senjata dan dukungan keuangan. Presiden Aljazair saat itu, Houari Boumédiène, sangat mendukung transisi tersebut yang diperlihatkan dengan menunjuk Front Polisario sebagai gerakan pembebasan pada Juni 1975 (Besenyo, 2018).

Maroko ingin Sahara Barat kembali menjadi bagian wilayah mereka, sedangkan etnis Sahrawi yang dipimpin Front Polisario ingin kemerdekaan atas Sahara Barat. Perbedaan keinginan antara Maroko dan Front Polisario ini menyebabkan pecahnya perang terbuka di antara kedua pihak. Mauritania yang sempat bersekutu dengan Maroko memutuskan untuk menarik diri dari konflik ini pada tahun 1979 dikarenakan serangan dari Front Polisario yang berhasil mengalahkan Mauritania (Besenyo, 2018). Sejak awal peperangan, Maroko selalu berhasil mendahului operasi militer (Gila et al., 2009).



Gambar 2. 1 Peta Pembagian Wilayah Sahara Barat (Dworkin, 2022)

Hingga 1991, Maroko telah berhasil menguasai $\frac{3}{4}$ dari keseluruhan wilayah Sahara Barat. Lalu dengan merujuk pada Gambar 2.1, Maroko membangun tembok besar yang membentang dari perbatasan Aljazair-Maroko di Utara hingga perbatasan Mauritania di Selatan (digambarkan dengan garis melintang berwarna merah muda). Tembok tersebut dibangun untuk mengamankan wilayah Sahara Barat yang mereka kuasai. Tembok tersebut membagi dua wilayah Sahara Barat, yaitu wilayah yang dikuasai Maroko dan wilayah yang dikuasai Front Polisario (Gila et al., 2009).

Selama perang berlangsung, SADR juga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan mereka. Pada tahun 1982, SADR diterima sebagai anggota OAU (*Organisation of African Unity*), namun hingga akhir 1980-an, hanya 79 negara yang mau mengakui SADR. Dari semua negara

tersebut, tidak ada negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa, sehingga pengakuan negara-negara tersebut tidak memberikan dampak yang besar untuk SADR. Bahkan jumlah negara yang mengakui SADR berkurang menjadi 53 pada 2006, dan berkurang lagi menjadi 32 pada 2008 (Gila et al., 2009).

Pada November 2020, Front Polisario menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri gencatan senjata dengan Maroko. Gencatan senjata ini diinisiasi oleh PBB dan sudah berlangsung selama 29 tahun. Tindakan ini dilakukan setelah pihak Maroko diketahui mengusir para pengunjung rasa Sahrawi yang tidak bersenjata dengan menggunakan kekerasan saat mereka melakukan blokade ke Maroko di jalan menuju Mauritania. Selanjutnya, Front Polisario melanjutkan kembali serangannya terhadap Maroko di Sahara Barat. Beberapa serangan yang dilakukan oleh Front Polisario antara lain adalah yang dilakukan pada Januari hingga Februari 2021, dimana pihak Front Polisario melakukan serangan ke *the Berm*, tembok sepanjang 2.700 km yang dibangun oleh Maroko untuk mencegah pejuang gerilya dari Front Polisario memasuki wilayah kekuasaan Maroko. Sejak saat itu belum ada serangan lebih lanjut, namun Front Polisario terus menembaki pasukan Maroko yang ada di sekitar tembok pembatas (IISS, 2021).

Dengan pernyataan berakhirnya gencatan senjata oleh Front Polisario, Maroko juga turut kembali melakukan serangan terhadap Front Polisario. Pada November 2021, Maroko dianggap sebagai dalang serangan kepada tiga pengemudi truk Aljazair dalam perjalanan mereka ke Mauritania. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat tak berawak dan terjadi di wilayah Sahara Barat yang dikuasai oleh Front

Polisario. Pihak Aljazair yang marah menyalahkan Maroko dan bersumpah akan membalas perbuatan Maroko. Lalu pada April 2022, kembali terjadi serangan terhadap konvoi truk sipil di dekat perbatasan Mauritania yang mengakibatkan terbunuhnya tiga orang. Meskipun tidak diketahui siapa dalang dari serangan tersebut, Aljazair kembali menuduh bahwa serangan tersebut adalah ulah angkatan udara Maroko (Fabiani, 2023).

2.2.3 Peran PBB dalam Konflik Sahara Barat

Perang di Sahara Barat berlangsung hingga 1991, tepatnya setelah perjanjian gencatan senjata yang diinisiasikan oleh PBB berhasil menghentikan perang secara efektif. Setelahnya PBB membentuk MINURSO (*United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara*) dengan tujuan mengurus segala hal terkait dengan referendum, dimana rakyat Sahara Barat akan memilih antara kemerdekaan atas Sahara Barat atau integrasi dengan Maroko. Pada tanggal 24 Mei 1991, PBB mengusulkan bahwa gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario harus mulai berlaku pada 6 September 1991. Kedua belah pihak menyetujui hal tersebut, namun selama selang waktu tersebut, salah satu pihak menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyetujui bahwa gencatan senjata harus dimulai pada 6 September. Namun, terjadi konflik terjadi di Sahara Barat, sehingga pihak PBB memutuskan bahwa gencatan senjata tetap harus resmi berlaku pada 6 September 1991. Pada awal pembentukannya, fungsi utama MINURSO terbatas pada verifikasi gencatan senjata dan penghentian permusuhan antara pihak Maroko dan Front Polisario (MINURSO, n.d.-b).

PBB melalui MINURSO terus melakukan berbagai upaya untuk membantu penyelesaian masalah Sahara Barat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya pada Maret 1997, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk James Baker III, mantan Menteri Luar Negeri AS, sebagai utusan pribadinya terkait masalah Sahara Barat. selanjutnya pada September 1997, James Baker berhasil melakukan perundingan di antara pihak yang terlibat yang sekaligus mengarah pada diterapkannya *Houston Accords*. Pada Juni 2001, James Baker menyampaikan *Baker's Plan I* yang berisikan bahwa referendum akan diganti dengan pemungutan suara mengenai otonomi terbatas. Maroko akan mengontrol Sahara Barat sementara etnis Sahrawi akan memiliki kompetensi eksklusif atas isu-isu lokal. Kerangka kerja tersebut diterima oleh pihak Maroko namun ditolak oleh Front Polisario. Selanjutnya, James Baker mengusulkan rencana lain (*Baker's Plan II*) yang berisi bahwa referendum akan diatur dalam jangka waktu empat hingga lima tahun dan menawarkan tiga pilihan kepada penduduk Sahara Barat, yaitu kemerdekaan, otonomi, atau integrasi penuh dengan Maroko. Rencana tersebut diterima oleh Front Polisario, Aljazair, dan Dewan Keamanan PBB namun ditolak oleh Maroko. Pada Juli 2003, James Baker kembali dengan versi revisi dari rencananya, yang salah satunya berisi upaya perlindungan. Revisi tersebut didukung oleh Front Polisario dan Aljazair namun lagi-lagi ditolak oleh Maroko (MINURSO, n.d.-a).

Pada bulan Juni 2007, Maroko dan Front Polisario mengadakan pembicaraan di Manhasset. Pertemuan ini merupakan pertemuan langsung kedua pihak sejak tahun 2000. Front Polisario menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan rencana

otonomi Maroko, namun mereka juga terus mendesak untuk dilaksanakannya referendum mengenai penentuan nasib sendiri. Namun, pihak Maroko mau memberikan penawaran penentuan nasib sendiri hanya berdasarkan otonomi (MINURSO, n.d.-a). Selanjutnya Maroko dan Front Polisario yang dibantu PBB terus melakukan pembicaraan mengenai Sahara Barat, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum ada hasil signifikan dari peran PBB dalam konflik Sahara Barat selain gencatan senjata.

2.3 Kepentingan Maroko dalam Normalisasi Hubungan

Maroko yang setuju untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yang ditengahi Amerika Serikat tentunya memiliki kepentingan di dalamnya. Kepentingan yang dimiliki oleh Maroko ini selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut di dalam subbab ini. Kepentingan yang dimiliki Maroko ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan Maroko dengan Israel dan kepentingan Maroko dengan Amerika Serikat.

2.3.1 Kepentingan Maroko dengan Israel

Dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, Maroko memiliki beberapa kepentingan dengan Israel. Beberapa di antaranya adalah membentuk hubungan yang diplomatik, damai, dan bersahabat antara kedua pihak. Dimana selanjutnya hal ini akan berlanjut pada terciptanya perdamaian di kawasan, meningkatkan keamanan regional, dan membuka peluang baru bagi seluruh kawasan. Selain itu, kedua pihak juga akan mempromosikan kerja sama bilateral ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif. Israel dan Maroko juga akan membuka kerja sama di

berbagai bidang, seperti perdagangan, inovasi dan teknologi, pariwisata, dan sektor lainnya (U.S. Embassy Rabat, 2020).



Gambar 2. 2 Penandatanganan Joint Declarations terkait Normalisasi Hubungan Diplomatik Maroko-Israel (U.S. Embassy Rabat, 2020)

Dengan membuka hubungan diplomatik penuh, Maroko dan Israel setuju untuk secepatnya membuka kembali kantor penghubung di Rabat, Maroko dan Tel Aviv, Israel. Kantor penghubung ini sebelumnya sempat dibuka pada 1994 namun berhenti saat Maroko membekukan hubungannya dengan Israel pada 2000. Maroko dan Israel juga akan memberikan otorisasi untuk penerbangan langsung antara Maroko dan Israel, termasuk oleh perusahaan penerbangan dari Maroko dan Israel. Merujuk pada gambar 2.2 di atas, Maroko, Israel, serta Amerika Serikat bersama-sama melakukan penandatanganan untuk *joint declarations* sebagai bentuk resmi dari normalisasi Maroko-Israel. Penandatanganan ini dilakukan pada 22 Desember 2020. Kepentingan-

kepentingan antara Maroko dan Israel tersebut tertulis di dalam *joint declarations* tersebut (U.S. Embassy Rabat, 2020).

Pada Agustus 2021, Israel secara resmi membuka kantor penghubung di Rabat, Maroko. Kantor penghubung tersebut diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid saat ia melakukan kunjungan ke Maroko (Al Jazeera, 2021b). Sebelum peresmian ini, kantor penghubung Israel untuk Rabat sebenarnya sudah dibuka beberapa bulan sebelumnya, namun kantor tersebut masih bersifat sementara. Hal ini dikarenakan bangunan yang akan digunakan untuk kantor penghubung tetap yang dulu sempat dibuka pada 1990-an perlu direnovasi (Zaken, 2021). Selain meresmikan kantor penghubung, Lapid juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Kerjasama Afrika dan Masyarakat Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita. Topik pembicaraan yang dibahas berfokus pada masalah bilateral dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Mereka juga menandatangani tiga perjanjian untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang politik, budaya, olahraga, dan layanan udara (Embassy Of The Kingdom Of Morocco in the United States, n.d.).

2.3.2 Kepentingan Maroko dengan Amerika Serikat

Pada 22 Desember 2020, atau dua belas hari setelah Maroko dan Israel menyatakan pembukaan hubungan di antara mereka, ketiga pihak terkait, yaitu Maroko dan Israel sebagai pihak yang melakukan normalisasi hubungan, dan Amerika Serikat sebagai penengah dan yang membantu mewujudkan normalisasi, menandatangani *joint declaration*. Salah satu isinya adalah pernyataan Amerika Serikat yang mengakui

kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat dan menegaskan dukungannya terhadap usulan otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil terhadap sengketa wilayah Sahara Barat (U.S. Embassy Rabat, 2020). Pernyataan ini menjadi salah satu kepentingan utama Maroko dengan Amerika Serikat serta salah satu latar belakang Maroko melakukan normalisasi dengan Israel.

Dengan diakuinya kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, Amerika Serikat menunjukkan keinginannya untuk memfasilitasi Maroko dalam mencapai tujuan tersebut. Beberapa cara yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan mendorong pembangunan di bidang sosial ekonomi dengan Maroko, termasuk di wilayah Sahara Barat. Amerika Serikat juga akan membuka konsulat di wilayah Sahara Barat, tepatnya di Dakhla, untuk mempromosikan peluang ekonomi dan bisnis (U.S. Embassy Rabat, 2020). Selain melakukan penandatanganan *joint declarations* antar ketiga negara, Maroko dan Amerika Serikat juga menandatangani dua memorandum yang berisi mengenai Amerika Serikat yang akan menginvestasikan 3 miliar dollar AS di Maroko dan wilayah Sahara Barat (Kingdom of Morocco, 2020). Amerika Serikat juga memberikan bantuan di bidang militer kepada Maroko, salah satunya adalah dengan menjual drone dan senjata senilai 1 miliar dollar AS (Al-Anani, 2021).

Kantor Konsulat Amerika Serikat yang disebutkan akan dibangun di wilayah Dakhla, Sahara Barat telah secara resmi dibuka pada 10 Januari 2021 oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Maroko, David T. Fischer. Pembukaan kantor konsulat ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Fischer menekankan bahwa tujuan kunjungannya ke Dakhla dan

peresmian konsulat ini adalah untuk menggarisbawahi fokus Amerika Serikat dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi, perdamaian, dan stabilitas di Maroko, khususnya di Provinsi Selatan. Selanjutnya, juga dilakukan kunjungan ke lokasi-lokasi potensial yang di masa depan dapat berfungsi sebagai konsulat fisik Amerika Serikat di Dakhla. Survey tersebut dilakukan karena hingga saat ini, konsulat Amerika Serikat di Dakhla masih berbentuk Pos Kehadiran Visual (*Visual Presence Post*). Pos ini memiliki peran dalam memberikan informasi penting mengenai layanan konsuler, peluang pertukaran budaya, dan pengumuman pemerintah Amerika Serikat mengenai program baru yang akan mendorong investasi ekonomi dan bisnis di wilayah tersebut. Pos ini juga dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemerintah Amerika Serikat masih membutuhkan waktu untuk memenuhi persyaratan peraturan dan keamanan yang diperlukan untuk membuka konsulat di Dakhla (U.S. Embassy Rabat, 2021).